

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Studi Deskriptif Peran Kepala Sekolah dalam MBS di SDN 36/Rantau Panjang III

Muhammad¹, Megawati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i4.730>

*Correspondence: Muhammad

Email:

tengkumuhammad862@gmail.com

Received: 08-06-2024

Accepted: 14-07-2024

Published: 19-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *With the aim of improving the quality of education, School-Based Management (SBM) is an educational management approach that aims to improve the quality of education by encouraging schools to have autonomy or independence and encouraging citizen participation in the decision-making process. By implementing School Based Management, schools are expected to be able to achieve educational standards and achieve quite good results. Management of school facilities and infrastructure aims to ensure that students feel what they need while at school. This study aims to determine the extent to which the existing facility infrastructure has been improved by implementing school-based management (SBM) at SDN 36/Rantau Panjang III. A qualitative descriptive study design was employed in this investigation, and the principal was interviewed and data was gathered through observation. The results of the research data show that the role of the principal in SBM in an effort to improve infrastructure facilities at SDN 36/VI Rantau Panjang III has been organized and managed quite well and is in accordance with the basic needs of the school, especially in fulfilling the standards of infrastructure facilities.*

Keywords: *SBM, The Role of School Principals, Infrastructure*

Introduction

Pendidikan mempunyai peran begitu berarti dalam menciptakan generasi yang cemerlang, bermutu dari berbagai ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Hingga perihal demikian, baik dari segi keadaan berbagai aspek, perjanjian pemerintahan dalam menaikkan mutu Pendidikan sebaiknya tidak berganti ganti. Pemerintahan wajib tidak berubah- ubah untuk meningkatkan mutu ataupun kuantitas pendidikan. Perihal ini berarti terdapatnya, sebab strategi dalam hal memajukan sesuatu negeri Pendidikan yang sepatutnya jadi dasar yang paling utama (Saeful Rahmat, 2016).

Mulyasa (2005) dalam Tombakan (2007) menerangkan bahwa segala jenis program-program yang dilakukan sudah membagikan keberharapan untuk keberlangsungan serta terkontrolnya mutu Pendidikan yang berada di Indonesia. Walaupun demikian, karena tatakelola yang begitu kaku serta sentral membuat program-program tersebut juga kurang sangat memberikan imbas baik dan merata, karena berdasarkan survei angka keikutsertaan serta mutu Pendidikan yang senantiasa menyusut. Management adalah permasalahan utama yang wajib dijadikan prioritas serta pastinya wajib dibenahi dengan sebaik mungkin. Dalam perihal ini timbul suatu ide pemikiran yang tertuju pada pendidikan yang membagikan sepenuhnya kepada pihak sekolah guna mengendalikan serta melakukan berbagai macam kebijakan secara luas se luas-luasnya. Seiring berjalannya pemikiran tersebut munculah sistem yang disebut dengan Management Berbasis Sekolah (MBS) ataupun School Based Management (SBD), yang terus menerus sukses mencetak pembangunan serta membawa keadaan Pendidikan kearah yang lebih maksimal dan membongkar permasalahan Pendidikan di berbagai Negara berkembang maju, salah satunya adalah Australia serta Negara Amerika (Singal, 2015).

Peran pendidikan di tingkat nasional dalam menaikkan kualitas SDM bisa digapai pada saat dilaksanakan melalui proses yang baik serta terencana. Tetapi ranah pendidikan yang ditunjukan guna menaikkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Negara Indonesia yang berwawasan ilmu pengetahuan serta teknologi, belum terwujudkan di seluruh kalangan serta kategori Pendidikan sekolah di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD).

Perhal ini disebabkan karena keadaan setiap daerah yang berbeda, ruangan serta perlengkapan yang belum sesuai ketentuan yang berlaku, pedanaan yang terbatas serta masih belum terencana penggunaannya, dan keterampilan serta kedisiplinan baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih harus ditingkatkan(Lee, 2018; Welsh, 2018; Wenner, 2017). Dalam meningkatkan kualitas pendidikan bisa diraih bila sekolah dengan berbagai ragam diberi kewewenangan untuk mengendalikan dan mengelola lingkungan sesuai kebutuhan siswa hal ini, membagikan hak wewenang dan kewajiban

yang sangat leluasa kepada pihak sekolah agar secara aktif dan dinamis mengusahakan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan melewati sumber kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Walau demikian standar kualitas senantiasa terpelihara, wajib ada acuan standar kualitas yang disepakati secara keseluruhan dalam ruang lingkup nasional untuk dijadikan penanda keberhasilan peningkatan kualitas (Setiawan, Sudrajat dan Tedjawiani, 2022).

Dengan mempertimbangkan semua kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, desentralisasi dalam dunia pendidikan berfokus pada otonomi sekolah, proses pemberdayaan sekolah, serta tingkat partisipasi masyarakat. Ini kemudian memicu pengelolaan sekolah yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan melalui fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Gil-Flores, 2017). Tiga pilar utama manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan sekolah, proses pembelajaran yang lebih efisien, serta adanya peran warga sekolah. Proses tatakelola dalam ilmu manajemen berbasis sekolah berarti bahwa pihak sekolah harus bisa untuk mengelola serta mengatur sumber daya pendidikan yang dimilikinya secara mandiri sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki sekolah. Menurut Pasal I Pasal 20 UU No. 20 tahun 2003, "segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana" adalah sumber daya pendidikan. (Wijaksono dan Mushoffa, 2023).

Untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), guru harus berinovasi untuk meningkatkan manajemen kelasnya. Guru berfungsi sebagai model dan panutan langsung bagi siswa di kelas. Menangani hal tersebut, diharapkan guru harus siap dengan semua tanggung jawab, termasuk mengelola pelajaran dan menyiapkan materi pelajaran. Selain itu, guru juga harus tahu bagaimana mengorganisasikan kelas, termasuk pembagian tugas kepada siswa, ketertiban, tempat duduk, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat. (Setiawan, Sudrajat dan Tedjawiani, 2022).

Berdasarkan hasil observasi bahwa di SDN 36/VI Rantau Panjang III bahwa sampai sekarang ini prestasi akademik ataupun non akademik yang telah dicapainya masih tergolong sedang. Mengapa demikian karena disaat penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022/2023 yang setiap tahunnya meningkat sedangkan dalam segi fasilitas umum seperti ruang kelas, alat belajar dan penunjang kamar mandi, tempat wudhu, mushola masih kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa beratnya tugas yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga perlu adanya dukungan-dukungan dari berbagai pihak untuk membantu kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dukungan tersebut dapat berasal dari lingkungan masyarakat sekitar,

guru, dan staf administrasi. Keunggulan dan kemandirian sekolah pada dasarnya dijamin oleh kebijakan manajemen berbasis sekolah. Namun, hal ini belum dapat dicapai di lapangan. Tidak seperti yang diharapkan, desentralisasi pendidikan gagal karena sekolah belum benar-benar diberi kewenangan untuk mengatur diri mereka sendiri. Ini termasuk dalam hal bidang keuangan, bantuan operasional sekolah (BOS), kurikulum, dan materi pendidikan yang masih ditetapkan oleh pemerintah (Saputra dan Ahmad, 2022).

Menanggapi pernyataan-pernyataan sebelumnya, beberapa sekolah yang telah memulai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sejatinya selalu berupaya untuk menaikkan mutu pendidikan. Salah satu strateginya yaitu melalui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dengan tujuan memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil yang diinginkan. Fasilitas pendidikan harus menjadi bagian penting dari manajemen pendidikan. Semua fasilitas ataupun peralatan yang secara langsung mampu mempermudah atau membantu proses pendidikan termasuk dalam sarana pendidikan (Setiawan, Sudrajat dan Tedjawiani, 2022).

Peningkatan sarana dan prasarana dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga baik secara lokal, nasional, maupun global. Begitupun dalam bidang pendidikan yang merupakan salah satu problematika yang harus diatasi serta diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan bagi masa depan untuk menyiapkan generasi yang kompeten dan siap ikut serta di kancah globalisasi. Melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sekolah ini juga diharapkan mampu mempersiapkan siswa dalam menghadapi kemajuan yang terus berkembang pesat. (Yoga, 2019).

Berdasarkan penjelasan pendahuluan di atas peneliti berminat untuk mengambil judul “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Studi Deskriptif Peran Kepala Sekolah Dalam MBS Di SDN 36/VI Rantau Panjang III” dengan harapan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi sekolah yang mulai menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, terutama untuk meningkatkan kualitas pengadaan sarana dan prasarana guna menyongsong instansi pendidikan berkualitas tinggi, membekali peserta didik dengan wawasan yang lebih seiring dengan perkembangan zaman, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi global di tingkat nasional dan internasional.

Methodology

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan serta menyampaikan tentang situasi atau keadaan yang kompleks. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berusaha menafsirkan sesuatu arti

peristiwa, interaksi peristiwa manusia dalam suasana tertentu. Penelitian ini bertempat di SDN 36/ Rantau Panjang III yang bertempat di Kelurahan Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Prov. Jambi. Adapun metode pengambilan data yang digunakan yaitu sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif, agar mendapatkan data yang sesuai. Dengan pengambilan data memakai Triangulasi wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Result and Discussion

1. Hasil Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi atau pengamatan. Narasumber untuk wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan kepala sekolah. Adapun pertanyaan yang diberikan yaitu terkait pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Sarana Prasarana di SDN 36/VI Rantau Panjang III. Butir pertanyaan yang disiapkan untuk masing masing narasumber telah disiapkan oleh peneliti disesuaikan dengan cakupan tanggung jawab dan kewenangan beban kerja kepala sekolah bersangkutan. Pertanyaan yang disiapkan tentunya berfokus pada topik-topik terkait sarana prasarana yang digunakan di sekolah (Day, 2016; Stazi, 2017).

Semua jawaban dari pertanyaan yang dibuat kemudian dikumpulkan dan diproses menjadi data, setelah itu digunakan untuk menyimpulkan tujuan penelitian. Untuk menentukan pencapaian tujuan penelitian, penulis menganalisis data wawancara dan membaginya sesuai dengan dimensi, elemen, dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun metode dalam pelaksanaan wawancara mengacu pada metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang dalam mendukung tahap pembelajaran tidak hanya diperlukan pada fasilitas belajar yang ada pada ruang kelas saja, namun juga pada infrastruktur umum sebagai fasilitas pendukung penunjang dalam proses pembelajaran, Ibu Hj. Asmiah, S. Pd selaku kepala sekolah menyatakan bahwa, kebutuhan peserta didik bukan perihal kepuasan dalam menyampaikan materi yang dilakukan oleh guru kelas saat menggunakan sarana belajar yang dianggap baik, tetapi pula peserta didik memerlukan aspek yang disebut dengan kenyamanan dalam proses menuntut ilmu ketika berada di sekolah, apalagi perihal sesuatu yang seringkali diremehkan, itu dapat mempengaruhi kenyamanan peserta didik di sekolah, contoh dalam hal infrastruktur kamar mandi,

tempat wudhu serta mushola dan selalu meminta pendapat dari semua stake holder terutama dalam perihal sarana prasarana.

Maka dari itu, jika dilihat dari segi manajemen berbasis sekolah, dalam hal penerapan dan proses perencanaan standar sarana prasarana sekolah, manajemen berbasis sekolah dapat dianggap telah menerapkan sistem dan telah memenuhi standar MBS yang berlaku. Ini karena semua stake holder, terutama kepala sekolah dan guru, terlibat dalam proses perencanaan pemenuhan sarana prasarana.

2. Evaluasi

Kepala Sekolah Ibu Hj. Asmiah, S. Pd berkata bahwa, Dinas Pendidikan setempat pernah melaksanakan evaluasi prasarana dan sarana, dimana evaluasi ini mempunyai tujuan dalam rangka pelaksanaan penilaian akreditasi serta menilai progres sekolah dalam hal perbaikan kualitas pendidikan di sekolah.

Pada dasarnya, pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan maupun penerapan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah sejatinya ditujukan berfokus pada kebutuhan yang telah kemudian menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah akhirnya disesuaikan dan dikelola kembali yang bertujuan guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya di SDN 36/ VI Rantau Panjang III ini. Tidak hanya kepala sekolah yang berperan ada pula guru-guru yang ditugaskan khusus untuk mengecek sarana serta prasarana tertentu.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses evaluasi, perencanaan ataupun penerapan pengadaan sarana prasarana, dilaksanakan mengacu kepada pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan. Sehingga dapat diartikan sekolah telah mempraktikkan kegiatan evaluasi yang merupakan bagian dari proses manajemen berbasis sekolah. Tetapi tidak seluruh stakeholders terlibat dalam perihal ini, hanya kepala sekolah dan guru tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan sarana dan prasarana, baru setelah itu hasil dari proses sosialisasi evaluasi kepada seluruh stakeholders yang berada di lingkungan sekolah.

3. Pengadaan dan Pengembangan

Kepala sekolah menyatakan bahwa proses pengelolaan sarana prasarana bergantung pada standar yang telah ditetapkan terkait sarana prasarana yang tepat dan sesuai dengan keperluan untuk manajemen sekolah. Adapun metode atau langkah-langkah yang dimaksud dalam proses pengadaan ini yaitu meliputi kegiatan pembelian sarana/prasarana, pembuatan sarana/prasarana secara manual oleh sekolah, penerimaan bantuan, hibah, pendaur-ulangan, dan perbaikan atau rekondisi.

Dalam hal pengadaan sarana untuk sekolah, hal-hal yang dinilai masih kurang dalam hal kelengkapan, baik dalam hal sarana penunjang belajar maupun sarana pembangunan yang sudah ada. Sarana penunjang sekolah seperti komputer dan sarana keagamaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kemudian disamping pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan belajar, kepala sekolah juga menyatakan bahwa pihak sekolah juga tetap memberikan perhatian yang tidak kalah besar pengadaan dan pengembangan dalam aspek kenyamanan buat peserta didik ataupun guru yang berada dilingkungan sekolah. Sarana prasarana tersebut meliputi fasilitas ibadah, tempat wudhu dan kamar mandi (toilet). Kenyamanan merupakan yang sangat dicermati oleh sekolah, pengadaan yang dipaparkan diatas telah ada tetapi masih belum optimal mengapa pengadaan serta pengembangan yang di paparkan diatas mesti dilakukan dengan optimal dikerena dengan diberikannya rasa aman kepada masyarakat sekolah hingga bisa mempengaruhi pada kenaikan kualitas pengajaran serta pembelajaran disekolah.

Hasil analisis yang didapat terkait pengadaan dan pengembangan sarana prasarana menunjukkan bahwa sistem manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam sosialisasi dan proses penggunaan sarana dan prasarana sebagai alat belajar mengajar. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus lebih aktif berpartisipasi dalam sosialisasi dan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan atau *maintenance* ialah suatu aktivitas yang sifatnya berkelanjutan untuk mengupayakan sarana prasarana yang sudah ada senantiasa dalam kondisi baik, kepala sekolah berkata, “ pemeliharaan sarana prasarana wajib dilaksanakan dengan optimal serta dirawat dengan maksimal supaya barang-barang yang digunakan tidak mengalami kehancuran dan manfaatnya bisa dirasakan bila diperlukan kembali”.

Beliau juga berkata ,“ dalam setiap langkah-langkah dalam perawatannya dilakukan tergantung tipenya ataupun barang tersebut. Contohnya sarana olahraga, setelah pemakaian diletakan kembali pada tempatnya, begitupun dengan fasilitas lainnya. Perawatannyapun sesuai prosedur pada umumnya. Perbaikan dan perawatan sarana prasarna dilakukan setelah pihak sekolah melakukan pengecekan teratur untuk mengetahui kualitas sarana yang digunakan. Jika ada kerusakan, perbaikan dilakukan, dan jika tidak bisa diperbaiki, proses pengadaan kembali digunakan untuk barang atau sarana yang sama.

Oleh karena itu, semua kegiatan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pemeliharaan sesuai standar sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan

pedoman manajemen berbasis sekolah yang berkaitan dengan pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dapat dioptimalkan.

2. Pembahasan

1. Perencanaan

Perencanaan sarana prasarana dalam ruang lingkup pendidikan adalah salah satu bagian yang sangat berarti dari proses pendidikan. Dimana perencanaan ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan melalui peninjauan yang cermat dan intervensi yang baik, serta kebutuhan untuk mendukung prestasi akademik dan non akademik siswa (Samanhudi, 2021). Ini sejalan dengan pernyataan kepala sekolah, yang menyatakan, "bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah pastinya akan melaksanakan peninjauan terlebih dahulu terhadap kondisi sarana prasarana sekolah, apabila dirasa dalam penilaian kualitasnya kurang atau belum memenuhi standar, maka pihak sekolah harus menindaklanjuti perihal tersebut untuk mengatasi pemenuhan sarana yang kurang tersebut."

Dalam proses perencanaan salah satu langkah yang dilakukan adalah menganalisis dari segi kebutuhan pendidikan serta dengan menetapkan suatu program atas untuk masa yang akan tiba sebagai langkah awal sebelum melakukan sebuah evaluasi perihal sarana dan membuat perencanaan sarana prasarana dimasa yang akan datang (Jansen & du Plessis, 2023; Mthanti & Msiza, 2023; Riani & Ain, 2022). Hal ini wajib dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemegang otoritas paling tinggi di setiap lembaga pendidikan, harus meletakkan analisis kebutuhan pendidikan dan sekolah sebagai dasar untuk merencanakan program masa depan (Mardiah Astuti dkk., 2023).

Dalam melakukan analisis kebutuhan sekolah, perencanaan sekolah untuk pemenuhan standar sarana harus mempertimbangkan aspek MBS. Ini akan memungkinkan perencanaan sarana prasarana untuk dilaksanakan dengan lebih efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan perencanaan standar sarana dan prasarana di sekolah seyogyanya dilakukan oleh kepala sekolah selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan kebijakan tertinggi (Reynaldo, 2020). Proses ini sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan agar kekurangan, kelebihan dan kebutuhan dapat diketahui oleh pihak sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana yang ada sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan standar pada perencanaan awal mengenai pemenuhan standar sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah (Budaya, 2017).

Evaluasi diri adalah metode evaluasi yang dilakukan langsung oleh sekolah dalam hal sarana prasarana. Sekolah sering melakukan evaluasi sendiri, sehingga mudah melihat semua masalah yang ada di sekolah, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana, serta kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, sekolah dapat membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan setelahnya (Fauzi, 2020).

3. Pengadaan dan Pengembangan

Pengadaan dan pengembangan adalah bagian tambahan dari proses perencanaan serta evaluasi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar sarana prasarana di lingkungan sekolah (Khaleel et al., 2021). Langkah-langkah dalam proses pengadaan barang dilakukan sesuai dengan standar sarana prasarana dan kebutuhan sekolah (Rahman, 2023). Pengadaan sarana prasarana sekolah berarti menyediakan semua kebutuhan pembelajaran dan infrastruktur pendukung sesuai dengan manajemen yang dibuat oleh sekolah untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. (Dewi, 2020).

Dalam hal manajemen berbasis sekolah (MBS), sekolah harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk pemenuhan standar sarana dan prasarana. Ini berarti bahwa kepala sekolah harus memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan mereka. Karena kebutuhan ini sangat penting dalam pengadaan sarana prasarana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek (Anwar, 2021).

Pengadaan dalam jangka panjang adalah pengadaan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan baik untuk masa sekarang dan juga dibutuhkan di masa depan. Contoh pengadaan sarana berolahraga (lapangan) dan peralatan penunjang lainnya adalah contoh pengadaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengadaan jangka menengah adalah pengadaan sarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti pengadaan ruang untuk pelatihan dan pengembangan diri guru dan siswa baik akademik maupun untuk keperluan non akademik. Di sisi lain, pengadaan jangka pendek, berarti pengadaan sarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana jangka pendek (Reynaldo, 2020).

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah proses menjaga, merawat, dan mencegah suatu barang atau alat menjadi tidak layak sehingga tetap baik dan siap digunakan saat dipasang. Prasarana memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa fungsi dan tujuan pengadaannya tetap sama. Menurut Abdullah (2022), perawatan dan pemeliharaan alat teknologi khusus seperti PC dan infokus hanya dapat dilakukan oleh staf yang berpengalaman dengan alat tersebut. Pemeliharaan sarana

prasarana bertujuan untuk memaksimalkan perlengkapan yang sedang dan tidak dipergunakan. Ini sangat penting dalam hal biaya karena memberikan alat, barang, atau sarana prasarana akan jauh lebih mahal daripada menjaga dan memelihara sarana tersebut (Reynaldo, 2020).

Pemeliharaan sangat bermanfaat juga untuk memberi jaminan kesiapan operasional perlengkapan guna menunjang kelancaran pekerjaan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam hal pemeliharaan sarana prasarana juga harus dilakukan secara berkala serta berlanjut, yang bertujuan untuk memelihara nilai dari suatu barang dan alat yang masih ataupun akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran (Reynaldo, 2020).

Conclusion

Berdasarkan data hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam hal meningkatkan Sarana Prasana di tempat penelitian sudah tertata dan terkelola dengan cukup baik. Selain itu pelaksanaan manajemen berbasis sekolah juga sudah sesuai dengan kebutuhan pokok sekolah khususnya dalam pemenuhan standar sarana prasana. Karena sesuai dengan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kebijakan dan kewenangan seluruhnya kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan apa yang dimiliki oleh pihak sekolah. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa sekolah bisa mengoptimalkan peluangnya dalam menggunakan sarana dan prasarana selaku proses penunjang pendidikan.

Peningkatan standar sarana prasarana dengan mengacu pada sistem MBS dianggap sangat efektif karena sekolah memiliki wewenang seutuhnya untuk menjalankan prosesnya, baik dalam hal perencanaan, evaluasi, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan aspek sarana prasarana, sehingga pemanfaatannya dapat lebih sesuai dengan harapan sekolah.

References

- Anwar, M. (2021) "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah (Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah)," *Jurnal Syntax Admiration*, 2(8), hal. 1527–1544. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.290>.
- Budaya, B. (2017) "Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif," *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 18(1), hal. 42–59.
- Dewi, R.P. (2020) "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Deskriptif Kualitatif di SMPN 05 Lebong)," *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 14(3), hal. 103–108. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33369/mapen.v14i3.12915>.

- Fauzi, M. (2020) "Strategi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Al-Ibrah*, 2(2), hal. 120–145. Tersedia pada: <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/104>.
- Mardiah Astuti dkk. (2023) "Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pada Lembaga Pendidikan," *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(4), hal. 01–12. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61132/semantik.v1i4.33>.
- Rahman, M.A. (2023) "Evaluasi Terhadap Implementasi Manajemen Perpustakaan Sebagai Sarana Pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Gresik," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), hal. 203–215. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.190>.
- Reynaldo, D. (2020) *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di SMA Al Azhar 3 Banar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Saeful Rahmat, P. (2016) "Peran Pendidikan Dalam Membentuk Generasi Berkarakter Pancasila," *Pedagogi Jurnal Penelitian Pendidikan*, 3(2), hal. 1–15.
- Samanhudi (2021) "Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Islami di Lembaga Pendidikan," *Rayah Al-Islam*, 5(02), hal. 268–294. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.461>.
- Saputra, I. dan Ahmad, R. (2022) "Penerapan Desentralisasi Pendidikan pada Manajemen Berbasis Sekolah dari Pola Lama (Sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke Pola Baru (Era Desentralisasi)," *Keguruan : Jurnal Penelitian, Pemikiran, dan Pengabdian*, 10(2), hal. 66–70.
- Setiawan, M.R., Sudrajat, A. dan Tedjawiani, I. (2022) "Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Deskriptif Tentang Peran Kepala Sekolah Dalam MBS Pada SMPN 3 dan SMPN 4 Malangbong)," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), hal. 1335–1346. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.553>.
- Singal, A. (2015) "Penataan Daerah Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Lex Administratum*, 3(8), hal. 23–31.
- Tombokan, A. (2007) "Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 'School Based Management,'" *Paper seminar sistem informasi manajemen*, hal. 435–440.
- Wijaksono, A. dan Mushoffa (2023) "Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik di SD Islam Puspa Bangsa Banyuwangi. Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI), 1(2), 123–136. ualitas Peserta Didik di SD ," *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, 1(2), hal. 123–136.
- Yoga, S. (2019) "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), hal. 29–46. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.
- Day, C. (2016). *The Impact of Leadership on Student Outcomes: How Successful School*

- Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a Difference. *Educational Administration Quarterly*, 52(2), 221–258. <https://doi.org/10.1177/0013161X15616863>
- Gil-Flores, J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastructure. *Computers in Human Behavior*, 68, 441–449. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.057>
- Jansen, C., & du Plessis, A. (2023). The role of deputy principals: Perspectives of South African primary school principals and their deputies. ... *Management Administration \&* <https://doi.org/10.1177/1741143220975764>
- Khaleel, N., Alhosani, M., & Duyar, I. (2021). The role of school principals in promoting inclusive schools: a teachers' perspective. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.603241>
- Lee, E. Y. (2018). Epidemic obesity in children and adolescents: risk factors and prevention. *Frontiers of Medicine*, 12(6), 658–666. <https://doi.org/10.1007/s11684-018-0640-1>
- Mthanti, B. J., & Msiza, P. (2023). The roles of the school principals in the professional development of teachers for 21st century Education. *Cogent Education*. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2267934>
- Riani, S. S., & Ain, S. Q. (2022). The role of school principal in implementing education quality management. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/view/45216>
- Stazi, F. (2017). A literature review on driving factors and contextual events influencing occupants' behaviours in buildings. *Building and Environment*, 118, 40–66. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.03.021>
- Welsh, R. O. (2018). The School Discipline Dilemma: A Comprehensive Review of Disparities and Alternative Approaches. *Review of Educational Research*, 88(5), 752–794. <https://doi.org/10.3102/0034654318791582>
- Wenner, J. A. (2017). The Theoretical and Empirical Basis of Teacher Leadership: A Review of the Literature. *Review of Educational Research*, 87(1), 134–171. <https://doi.org/10.3102/0034654316653478>